

SKRIPSI

SITA UMUM ATAS ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT

(Studi Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ALDY

2010112015

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Shafira Hijriya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg: 8/PK-II/II/2025

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Muhammaad Aldy	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Padang / 3 November 2001 b. Nama Orang tua : Dasrial dan Risna Telda c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 2010112015		f. Tanggal Lulus : 7 Januari 2026 g. Predikat Lulus : Memuaskan h. Lama Studi : 5 Tahun 3 Bulan i. IPK : 3,63 j. Alamat : Karet, Kota Padang

**SITA UMUM ATAS ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO YANG
DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011)**

*(Muhammad Aldy, 2010112015, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2026)*

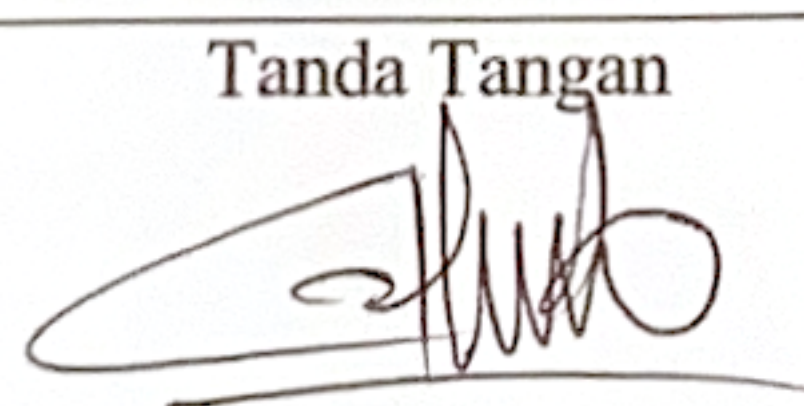
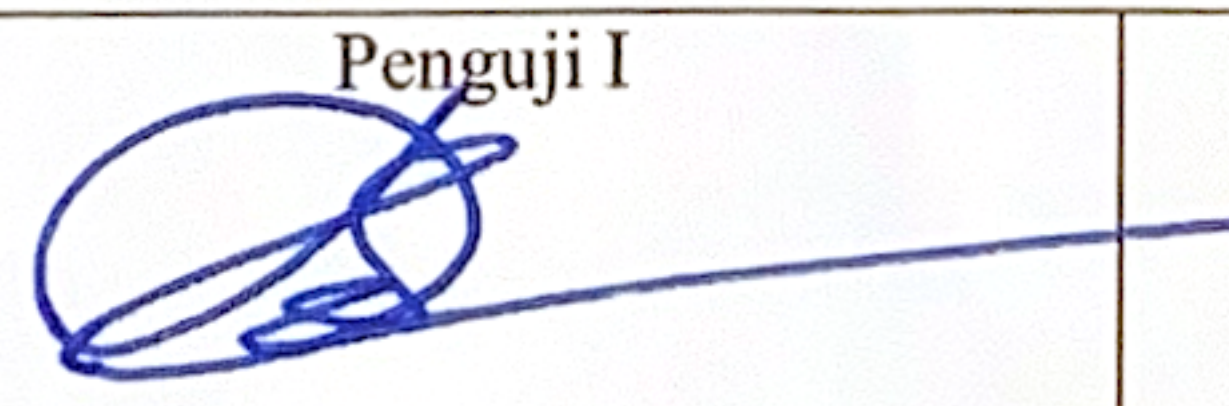
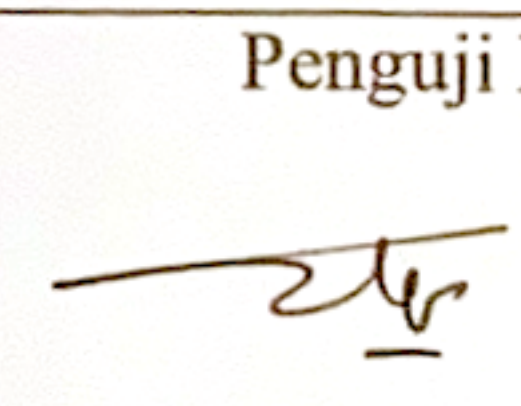
ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan bisnis di Indonesia, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN Persero tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tunduk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Risiko kerugian dalam kegiatan bisnis dapat menimbulkan utang yang berpotensi berujung pada kepailitan, sebagaimana terjadi dalam perkara kepailitan PT Istaka Karya yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011. Putusan tersebut memunculkan persoalan hukum terkait kedudukan aset BUMN Persero, khususnya mengenai larangan penyitaan aset negara dalam proses kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepailitan PT Istaka Karya berdasarkan putusan tersebut serta mengkaji kedudukan hukum aset BUMN Persero dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan penafsiran Mahkamah Agung terkait status hukum aset BUMN Persero dan kewenangan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menimbulkan ketidakpastian dan disparitas hukum. Selain itu, kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero mengalami perubahan status hukum menjadi kekayaan privat perseroan, sehingga dapat dijadikan objek sita umum dalam kepailitan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi dan penegasan regulasi guna menciptakan kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, serta perlindungan yang adil bagi kreditor dan BUMN Persero sebagai entitas bisnis.

Kata Kunci: BUMN, Kepailitan, Perbendaharaan Negara, Keuangan Negara

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 7 Januari 2026.

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Muhammad Aldy	Daswirman N, S.H.,M.H.	Andalusia, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Student Name : Muhammad Aldy	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang/ November 3 rd 2001 b. Parents Name : Darial dan Risna Telda c. Faculty : Law d. Concentration : Business Civil Law (CP-II) e. No. BP : 2010112015		f. Graduation Date : January 7 th 2026 g. Predicate : Satisfactory h. Lenght of Study : 5 Years 3 Month i. GPA : 3,75 j. Address : karet, Padang District

GENERAL ATTACHMENT OVER THE ASSETS OF STATE-OWNED ENTERPRISES (PERSERO) DECLARED BANKRUPT
(A Study of Supreme Court Decision Number 124 K/Pdt.Sus/2011)

(Muhammad Aldy, 2010112015, Concentration Program Business Civil Law (CP-II), Faculty of Law, Andalas University, 71 pages, 2026)

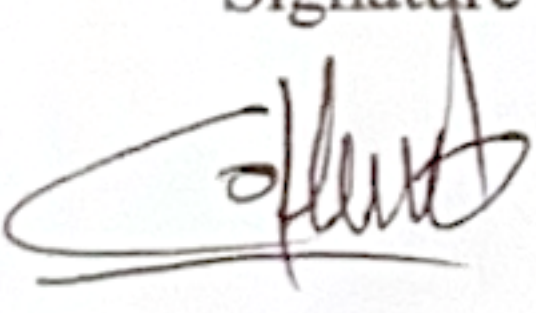
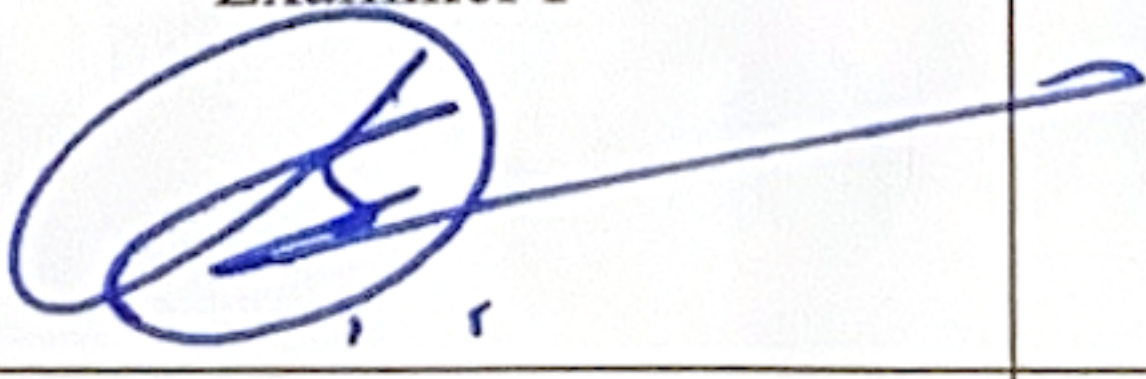
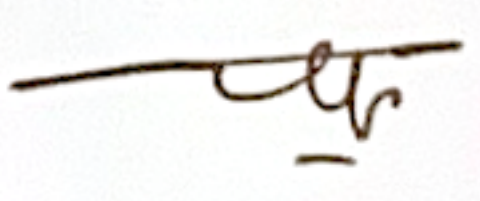
ABSTRACT

A Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT) is the most commonly used form of business entity in Indonesia, including by State-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) in the form of Persero, which play a strategic role in supporting national economic development. In carrying out their business activities, BUMN Persero are not solely profit-oriented but are also required to comply with prevailing laws and regulations. Business risks may result in financial losses that give rise to debts and potentially lead to bankruptcy, as illustrated in the bankruptcy case of PT Istaka Karya as decided in Supreme Court Decision Number 124 K/Pdt.Sus/2011. This decision raises legal issues concerning the legal status of BUMN Persero assets, particularly in relation to the prohibition on the seizure of state assets in bankruptcy proceedings. This study aims to analyze the bankruptcy of PT Istaka Karya based on the aforementioned decision and to examine the legal status of BUMN Persero assets within the framework of Law Number 1 of 2004 on State Treasury. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches and is descriptive-analytical in nature. The findings indicate that differing interpretations by the Supreme Court regarding the legal status of BUMN Persero assets and the authority of parties entitled to file bankruptcy petitions have resulted in legal uncertainty and disparity. Furthermore, state assets that have been separated and invested in BUMN Persero undergo a transformation in legal status into the private assets of the company, thereby rendering them subject to general attachment in bankruptcy proceedings. These conditions demonstrate the need for regulatory harmonization and clearer legal provisions to ensure legal certainty, consistency in the application of the law, and fair legal protection for both creditors and BUMN Persero as business entities.

Keywords: *State-Owned Enterprises, Bankruptcy, State Treasury, State Finance*

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by January, 7th 2026

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Muhammad Aldy	Daswirman N, S.H.,M.H.	Andalusia, S.H.,M.H.

Acquainted,

Head of the Departement of Civil Law : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

	Faculty/University	
No. Faculty Alumni:	Name:	Signature :
No. University Alumni:	Name:	Signature :